



## TINDAKLANJUTI PENGHENTIAN PPKM

# Pemda DIY Tunggu Inmendagri

YOGYA (KR) - Kasus Covid-19 di Indonesia termasuk DIY sudah melandai. Begitu pula dengan Persentase masyarakat yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 sudah memenuhi target, sehingga kekebalan komunal disimpulkan sudah semakin baik. Kondisi itu yang menjadi alasan kuat pemerintah untuk memutuskan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan, meskipun dengan berbagai catatan. Terkait hal tersebut, Pemda DIY akan segera menindaklanjuti penghentian PPKM tersebut setelah Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) resmi dikeluarkan.

"Penghentian PPKM tidak berarti seluruh urusan berkaitan dengan Covid-19 berakhir. Apalagi penghentian

ini bukan serta merta diiringi dengan berubahnya status pandemi menjadi endemi. Untuk mendapatkan status endemi, masih harus menunggu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevaluasi situasi global di Indonesia. Pandemi dinyatakan oleh WHO dan sampai saat ini WHO masih mengatakan bahwa di Indonesia Covid-19 ini masih pandemi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji se usai mendampingi Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X usai mengikuti Rakor yang diadakan Kemendagri RI sebagai Tindak Lanjut Pencabutan PPKM bersama pimpinan daerah di seluruh Indonesia secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Senin (2/1).

Baskara Aji mengatakan, apabila

Inmendagri sudah keluar, dirinya memastikan akan segera mempelajari untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Apabila pada level daerah diperlukan regulasi tambahan, maka akan segera diatur oleh Gubernur DIY. Adapun untuk Inmendagri diprediksikan baru akan diterima pekan depan. Karena pihaknya masih menunggu sehingga belum bisa membuat kebijakan untuk menindaklanjuti pencabutan PPKM.

Menyikapi banyak lembaga dan lingkungan kampus yang telah membarkan Satgas Covid-19, Sekda DIY mengaku tidak terlalu mempersoalkan. Meski begitu pihaknya menegaskan bahwa penanganan Covid-19 masih menjadi campur tangan pemerintah.

"Penanganan Covid-19 ini masih di-

intervensi pemerintah, termasuk pengobatan di rumah sakit. Jadi yang dihilangkan adalah PPKM-nya, pembatasan-pembatasannya saja. Seperti Peduli Lindungi dan sebagainya masih dilakukan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 di DIY belum dibubarkan. Satgas masih melakukan pantauan dan pengawasan terhadap mobilitas/masyarakat. Terutama pada perkembangan kasus pascalibur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang segera terpantau.

"Saat ini ketahanan masyarakat sudah tinggi, angka vaksinasi juga sudah tinggi jadi kami harapkan tidak

akan terjadi lonjakan," ujar Biwara.

Menurut Biwara, usai pencabutan PPKM ini peran masyarakat akan lebih besar dalam mengendalikan lonjakan kasus. Kondisi kesehatan dan kesadaran akan Covid-19 menjadi kesadaran masing-masing. Begitu pula dengan kesadaran penerapan proses yang tetap harus menjadi perhatian. Misalnya kapan harus membuka atau kapan harus mengenakan masker. Hal itu yang mutlak harus disadari masyarakat.

"Kalau tidak sehat harus di rumah saja, atau kemudian pakai masker, periksa dan sebagainya. Yang penting kesiapan rumah sakit dan obat. Peran masyarakat menyadari kondisinya dan apa yang harus dilakukan," jelas Biwara. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005